

DAFTAR PUSTAKA

- Ana,C. 2018. Mangrove dan Manfaatnya.
<https://kkp.go.id/bdasukamandi/artikel/4239-mangrove-dan-manfaatnya>.
(Di akses 31 Januari 2021).
- Badan Pusat Statistik. 2020. Luas Penutupan Lahan Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2014-2019 Menurut Kelas (Ribu Ha).
<https://www.bps.go.id/statictable/2020/02/17/2084/luas-penutupan-lahan-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2014-2019-menurut-kelas-ribu-ha-.html> (Di akses 3 Febuari 2021)
- CIFOR. 2015. CIFOR dan Indonesia Kemitraan untuk hutan dan manusia.
https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BCIFOR1402.pdf
(Diakses 31 Januari 2021).
- Donato, Daniel C. dkk. 2012. Mangrove adalah salah satu hutan terkaya karbon di kawasan Tropis. CIFOR brief, (12) 3-4.
- Dharmawan,Wayan Eka,Pramudji. 2014. Panduan Monitoring Status Ekosistem Mangrove. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hafsyah, Siti Sadida. 28 Juli 2020. Mangrove: Antara Tambak Udang dan Kelestarian. <https://www.forestdigest.com/detail/693/mangrove-antara-tambak-udang-dan-kelestarian> (30 Januari 2021)
- Kuswando, Agung. 2018. *The Distribution of Degraded Mangrove Ecosystem in Indonesia*.Kementerian Koordinasi Maritim dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Martuti, Nana Karida Tri. 2018.Ekosistem Mangrove (Keanekaragaman, Fitoremediasi, Stok Karbon, Peran dan Pengelolaan). Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang.

- Maulani, Alin , Nur Taufiq-SPJ, Ibnu Pratikto. 2021. Perubahan Lahan Mangrove di Pesisir Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Universitas Diponegoro, 10(1), 3-4. (Diakses 3 Febuari 2021)
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah nomor 44 tentang Perencanaan Kehutanan. Lembaran RI tahun 2004 no.146. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah nomor 6 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran RI tahun 2007 no.22. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. Undang Undang nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Lembaran RI tahun 2007 no.84. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia.2012. Peraturan Menteri Kehutanan nomor 44 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Lembaran RI tahun 2012 no.61. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 24 tentang Tata Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Lembaran RI tahun 2016 no.906. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 105 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Lembaran RI tahun 2018. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah nomor 26 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Lembaran RI tahun 2020 no. 137. Sekretariat Negara.
- Sutanto, Agustinus. 2020. Peta Metode Desain. Jakarta : Universitas Tarumanagara.
- Pemprov Jabar Kucurkan Rp32 Miliar untuk Pengembangan Wisata Muaragembong - (muaragembongkita.com)

Sutanto, Agustinus. (2021, 4 Febuari). "*Dromos Oikos*" *Notes on the fifth Ecology*.

Dipaparkan dalam kuliah tamu Tugas Akhir STUPA 8.31 Universitas Tarumanagara.